

RINGKASAN

Ristya Bayumilarsa. NIM: 202002020065. Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Studi Penelitian di Bagian Organisasi) Pembimbing I: Dr. Teguh Pramono, M.Si. Pembimbing II: Dr. IGG. Heru Marwanto, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Studi Penelitian di Bagian Organisasi) serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori dari Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik berdasarkan analisis teori Edward III. Komunikasi efektif melalui rapat staf berkala dan media elektronik, meskipun sosialisasi terbuka dan petunjuk masih kurang. Sumber daya manusia kurang mencukupi dengan kebutuhan 16 pegawai yang belum terpenuhi, namun staf meningkatkan kemampuan secara mandiri. Fasilitas memadai meskipun jaringan internet kadang tidak stabil. Disposisi pegawai menunjukkan komitmen tinggi dengan perekrutan melalui mutasi dan seleksi ASN serta adanya TPP. Struktur birokrasi baik, namun koordinasi sering terganggu oleh kepentingan masing-masing instansi dan tumpang tindih tugas. Faktor pendukung meliputi rapat koordinasi, keinginan staf untuk belajar, akses informasi, dan komitmen staf. Faktor penghambat termasuk kurangnya sosialisasi, jumlah staf tidak memadai, tidak adanya pedoman jelas, kendala internet, tumpang tindih koordinasi, dan SOP yang belum lengkap. Saran untuk penyempurnaan di masa depan meliputi perlu dilakukan sosialisasi kebijakan melalui kampanye komprehensif, lakukan evaluasi kebutuhan personel, perlu disediakan pedoman pelaksanaan kebijakan yang jelas, tingkatkan infrastruktur teknologi, perlu adanya forum koordinasi lintas-lembaga, dan penyusunan SOP yang responsif dan spesifik.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Tugas dan Fungsi

SUMMARY

Ristya Bayumilara. NIM: 202002020065. Implementation of Blitar Regent Regulation Number 94 of 2022 concerning the Position, Organisational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Regional Secretariat of Blitar Regency (Research Study in the Organisation Section) Supervisor I: Dr Teguh Pramono, M.Si. Supervisor I : IGG. Heru Marwanto, MM

This research aims to describe and analyze the Implementation of Regent Regulation No. 94 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, as well as the Work Procedures of the Secretariat of Blitar District (a Case Study in the Organization Department) along with its supporting and inhibiting factors. The research methodology employed a qualitative approach, focusing on Edward III's theories of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, with data analyzed using interactive analysis techniques. The study found that the implementation of Regent Regulation No. 94 of 2022 has proceeded well, supported by effective communication and adequate facilities, despite challenges such as inadequate human resources and occasional internet instability. Coordination issues and overlapping responsibilities were noted due to organizational interests. Supportive factors included coordination meetings, staff learning initiatives, information access, and staff commitment, while inhibiting factors included insufficient socialization, inadequate staffing, lack of clear guidelines, internet constraints, coordination overlaps, and incomplete SOPs. Recommendations for improvement include comprehensive policy socialization campaigns, personnel needs evaluations, clear policy implementation guidelines, enhanced technology infrastructure, inter-agency coordination forums, and development of responsive and specific SOPs.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Duties and Functions*